

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Beni Ahmad Saerbani. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Diana Halim Koencoro. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Lukman Santoso. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- M. Manullang. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Mardiasno, *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2012.
- Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Mintarti Indartini, Nurharibnu Wibisono, dan Assistriadi Widjiseno. *Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Sukoharjo: Penerbit Taujih, 2019.
- Mudrajad Kuncoro. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Sadu Wasistiono dan Yonathan Wiyoso. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Bandung: Fokusmedia, 2009.
- Siswanto Sunarno. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 1995.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sujanto. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Viktor M. Situmorang dan Jusuf Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

JURNAL

- Cahyatri Lisdanna S. dan Sabrina Anastasya A. "Kewenangan DPRD Kota Surabaya Dalam Fungsi Pengawasan Terhadap Penggunaan APBD Tahun 2025." *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 3, No. 11, 2025.
- Christianto, I., F. Wamafma, dan A. Suryana. "Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 3, No. 5, 2025.
- Muhammad Adam Rifqi, Lauddin Marsuni, dan Andry Wikra Waedhana Mamonto. "Efektivitas Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Terhadap Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah." *Jurnal Dialogica*, Vol. 1, No. 1, 2025.

- Salmon Bihuku. "Urusan Pemerintahan Konkuren Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah." *Lex Administratum* 6, no. 1 (2018).
- Sudiami, Faharudin, dan Saddam H. "Analisis Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana dalam Sistem Pemerintahan Daerah." *Journal Evidence of Law* 4, no. 3 (2023).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara.
- Peraturan DPRD Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Jepara.
- Peraturan Bupati Jepara Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara.

INTERNET

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara. "Jumlah Obyek Wisata menurut Klasifikasi di Kabupaten Jepara 2024." Diakses 28 Januari 2026.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara. *Kabupaten Jepara Dalam Angka 2025*. Diakses 10 Mei 2026.
- Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. "Sejarah." UPPD Kabupaten Jepara. Diakses 17 Juni 2026.
- CIMB Niaga. "10 Wisata Jepa yang Wajib Dikunjungi Saat Liburan." Diakses 28 Januari 2026.

WAWANCARA

- Nova, Tenaga Ahli Komisi A DPRD Kabupaten Jepara, 12 Mei 2026.

Sabat, Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, 12 Mei 2026.